

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya pengelolaan perusahaan dilakukan dengan memisahkan fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan. Fungsi kepemilikan akan diwakili oleh pemegang saham dan fungsi pengelolaan akan dilaksanakan oleh manajemen. Manajemen sebagai pengelola dapat berasal dari unsur pemegang saham dan dapat juga berasal dari independen. Akibat adanya pemisahan ini akan menyebabkan potensi terjadinya konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang timbul adalah konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan. Konflik ini timbul dikarenakan manajemen perusahaan mungkin akan lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan pemegang saham. Hal ini bisa terjadi karena manajemen perusahaan lebih mengetahui kondisi dan keadaan perusahaan.

Berawal dari konflik kepentingan tersebut, maka disusunlah suatu mekanisme yang dapat menyelesaikan konflik kepentingan. Mekanisme yang dimaksud adalah penerapan *good corporate governance* (GCG). *Good corporate governance* (GCG) merupakan suatu system yang didesain untuk dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan dan mendorong peningkatan nilai perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya. Dengan adanya GCG ini, diharapkan dapat menjembatani kepentingan antara manajemen dengan pemilik perusahaan.

Penerapan *good corporate governance* (GCG) semakin gencar diterapkan di perusahaan-perusahaan. Kejadian krisis ekonomi, telah memberi tahu banyak perusahaan untuk menganggap pentingnya penerapan *good corporate governance* (GCG). Penerapan GCG ini sangat penting khususnya bagi perusahaan perbankan. Belajar dari krisis ekonomi di masa lalu, perusahaan perbankan merupakan sector yang paling terdampak krisis. Dari krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998, banyak perusahaan perbankan yang mengalami kebangkrutan. Bahkan krisis yang

dialami perbankan membuat pemerintah Indonesia saat itu untuk melakukan tindakan penyelamatan perbankan. Tindakan yang selanjutnya diberikan nama BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Meskipun dalam perjalanan waktunya, bantuan tersebut mengalami banyak permasalahan hukum. Namun dari kejadian tersebut dapat diambil pelajaran bahwa pada saat krisis ekonomi, sektor perbankan merupakan sector yang rentan terdampak negatif. Dan dampak negatif yang dialami perbankan dapat mempengaruhi jalannya perekonomian suatu Negara.

Tabel 1.1
Data Fenomena Penelitian

No	Emiten	Tahun	Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan Institusional	Komite Audit	Kinerja Keuangan
1	BJTM	2020	0.04	79.48	150	1.78
2	BJTM	2019	0.04	79.55	200	1.79
3	BJTM	2018	0.10	79.68	150	2.01
4	BMRI	2020	0.02	60.00	300	1.23
5	BMRI	2019	0.02	60.00	257	2.16
6	BMRI	2018	0.01	60.00	350	2.15
7	BTPN	2020	0.67	93.60	725	1.10
8	BTPN	2019	0.67	93.60	600	1.65
9	BTPN	2018	0.93	59.88	180	2.10
10	MAYA	2020	4.84	87.03	133	0.07
11	MAYA	2019	4.56	87.03	200	0.57
12	MAYA	2018	4.55	87.03	167	0.50
13	SDRA	2020	0.03	85.89	240	1.41
14	SDRA	2019	0.03	85.89	300	1.35
15	SDRA	2018	0.09	85.89	500	1.82

Sumber: Laporan keuangan diunduh dari www.idx.co.id, 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bagaimana *good corporate governance* yang diukur dengan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Emiten BJTM menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial yang menurun dari tahun 2018 ke 2019, telah mempengaruhi penurunan kinerja keuangan tahun 2019. Pada tahun 2019, emiten BJTM mengalami penurunan kinerja keuangan disbanding periode sebelumnya. Hal yang sama juga dialami oleh emiten yang berkode BTPN dan

SDRA pada tahun 2019. Sebaliknya pada emiten MAYA dan BMRI di tahun 2019, ketika kepemilikan manajerialnya meningkat, kinerja keuangannya juga meningkat.

Sedangkan jumlah kepemilikan institusional pada emiten BJTM mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2020. Hal ini membuat kinerja keuangan emiten BJTM juga mengalami penurunan di periode yang sama. Kemudian, komite audit pada emiten SDRA menunjukkan bahwa penurunan kinerja komite audit tahun 2019 telah mendorong penurunan kinerja keuangan tahun 2019 yang apabila dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan fenomena di atas dapat diketahui bahwa *good corporate governance* yang diukur dengan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit perlu diperhatikan kinerja dan persentase kepemilikannya. Dengan pengelolaan perusahaan yang lebih baik, akan mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik lagi. Sehingga kinerja perusahaan yang baik akan menumbuhkan kepercayaan pihak pemilik perusahaan terhadap manajemen dan akan meminimalisir biaya keagenan yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga mekanisme dalam mengukur *good corporate governance* yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit.

Ketiga mekanisme *good corporate governance* ini diharapkan dapat menjadikan pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor kinerja keuangan perusahaan, utamanya menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen. Sedangkan kepemilikan manajemen berperan sebagai pihak yang menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajer akan merasa memiliki perusahaan yang berdampak pada tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. Kemudian keberadaan komite audit berperan untuk memberikan pendapat yang independen kepada dewan komisaris mengenai laporan keuangan dan hal lain yang disampaikan dewan direksi kepada dewan komisaris. Adanya komite audit

maka pengendalian terhadap laporan keuangan akan semakin baik sehingga dapat membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada meningkatnya kinerja perusahaan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Laksana (2015) meneliti tentang “*Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan” yang mengkaji pengaruh *corporate governance* perbankan pada kinerja keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Sedangkan proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

Sedangkan menurut Hartono dan Nugrahanti (2014) yang meneliti tentang “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja bank sedangkan kepemilikan institusi memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja bank. Hal ini karena didorong oleh kemampuan dua variabel tersebut dalam menentukan strategi perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Serta kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja bank. Hal ini disebabkan jumlah ukuran dari masing-masing variabel terlalu besar dan kurang efektif untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam pengambilan keputusan.

Nur'ainy, et. Al (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh *good corporate* pada kinerja perusahaan yang diukur dengan EVA (*economic value added*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* dapat mempengaruhi langsung pada kinerja perusahaan yang diukur dengan EVA, dan juga menunjukkan pengaruh secara tidak langsung melalui ukuran perusahaan. Selain itu, ukuran perusahaan memiliki peran mediasi dalam dampak pengelolaan perusahaan yang baik dalam penerapan tata kelola pada kinerja perusahaan.

Dari sekian banyak hasil penelitian tersebut, terlihat hasil yang cukup beragam. Akan tetapi, hasil yang beragam tersebut juga dipengaruhi perbedaan variabel yang digunakan oleh masing-masing peneliti. Perbedaan variabel yang digunakan para peneliti merefleksikan beragamnya indikator mekanisme *Corporate Governance* yang disebabkan luasnya definisi mekanisme *Corporate Governance* tersebut. Selain itu, hasil yang didapat berbeda mungkin dikarenakan perbedaan lokasi penelitian, sampel penelitian dan periode pengamatan yang berbeda. Untuk itu penelitian ini difokuskan meneliti sector perbankan. Sektor ini dipilih karena perbankan merupakan sector yang berperan penting dalam menyalurkan modal melalui pinjaman ke masyarakat. Akan tetapi sector perbankan juga merupakan sector yang rentan mengalami krisis. Berdasarkan kejadian di masa lalu, seperti tahun 1998 krisis ekonomi terjadi karena sector perbankan mengalami keadaan krisis. Akibat krisis ekonomi yang terjadi di sector perbankan, menyebabkan terjadinya krisis ekonomi negara. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi sector perbankan untuk meningkatkan tata kelola perusahaannya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini difokuskan pada:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?

3. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit secara simultan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh:

1. Kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
2. Kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020
3. Komite audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020
4. Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit secara simultan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

a) Manfaat Teoritis

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi di bidang keuangan sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya mengenai kinerja keuangan perusahaan.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan input atau masukan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance*, sehingga perusahaan dapat membantu mengevaluasi, memperbaiki dan mengoptimalkan fungsi mereka dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu meningkatkan laba dan kinerja perusahaan.

2. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun menjadi kajian bagi para pengguna laporan keuangan terutama investor mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance*, sehingga dapat menjadi pedoman dan pertimbangan dalam berinvestasi terutama yang berminat berinvestasi pada perusahaan perbankan.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Teori keagenan ini dikembangkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling. Teori keagenan merupakan sebuah teori yang berkaitan dengan hubungan prinsipal dan agen. Teori keagenan memiliki asumsi bahwa setiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Hal tersebut terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori Keagenan dalam perkembangannya terbagi menjadi dua aliran meliputi: (1) *Positive Theory of Agency*, teori ini memfokuskan pada identifikasi situasi ketika pemegang saham dan manajer sebagai agen mengalami konflik dan mekanisme pemerintah yang membatasi *self saving* dalam diri agen. (2) *Prinsipal Agen Literature*, memfokuskan pada kontrak optimal antara perilaku dan hasilnya yang secara garis besar penekanannya pada hubungan pemegang saham dan agen (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu: (a) asumsi tentang sifat manusia, (b) asumsi tentang keorganisasian, dan (c) asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *asymmetric information* (AI) antara prinsipal dan agen. Sedangkan asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan (Eisenhard, 1989).

Perbedaan asimetri informasi dapat terbagi atas dua jenis *asymmetric information*, yaitu: *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection*, yaitu

suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja (Jensen dan Meckling, 1976).

Dengan demikian, dibutuhkan pihak ketiga yang independen dalam hal ini adalah akuntan publik. Tugas dari akuntan publik (auditor) adalah memberikan jasa untuk menilai laporan keuangan yang dibuat oleh agen yang pada akhirnya sebagai hasil penilaian terhadap laporan keuangan berupa opini audit. Hasil daripada kondisi laporan keuangan tersebutlah pada nantinya merupakan informasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak berkepentingan yang salah satunya adalah pihak pemegang saham.

Hubungan antara prinsipal dan agen ini, merupakan hal mendasar bagi praktek penerapan *Corporate Governance* secara luas. Hal ini dapat kita lihat dalam teori-teori yang melandasi pengertian mengenai perusahaan sebagai tempat penerapan *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan). Perusahaan/korporasi dapat dipandang dari dua teori, yaitu (a) teori pemegang saham (*shareholding theory*) dan (b) teori stakeholder (*stakeholding theory*). *Shareholding theory* menyatakan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik/pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. Sementara itu, *Stakeholding theory*, menyatakan bahwa perusahaan adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan (Tjager, 2003).

Corporate Governance berkaitan dengan bagaimana para stakeholder (prinsipal) mendapatkan jaminan dan keyakinan bahwa manajer perusahaan (agen) akan memberikan keuntungan bagi mereka dan tidak menyalahgunakan wewenang atau menginvestasikan modal ke dalam proyek yang tidak menguntungkan. Dengan adanya penerapan *good corporate governance*, maka kinerja keuangan diharapkan akan mengalami peningkatan. Sehingga, apabila

manajemen dan pemilik perusahaan hendak meningkatkan kinerja keuangan maka dibutuhkan penerapan *good corporate governance* dengan maksimal.

2.1.2 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Kinerja keuangan merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan manajer. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan (Cahyani, 2009). Kinerja Keuangan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data yang berasal dari laporan keuangan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

Sedangkan tujuan penilaian kinerja (Mulyadi, 2003) adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.

Mulyadi (2003) menerangkan tentang manfaat dari penilaian kinerja adalah:

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, pengembangan karyawan, menyediakan kriteria seleksi, dan evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan, diantaranya sebagai berikut:

$$1. \text{ Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang dipunyai perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain jumlah aktiva yang sama bisa menghasilkan laba yang lebih besar dan begitupun sebaliknya (Sudana, 2009).

$$2. \text{ Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}}$$

ROE merupakan rasio yang mengukur laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri. Rasio ini mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham. Oleh karena itu, ROE dianggap sebagai representasi dari kekayaan pemegang saham (Sudana, 2009).

3. Profit Margin Ratio

Profit margin ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai perusahaan. *Profit margin ratio* dibedakan menjadi 3 bagian (Sudana, 2009), yaitu:

$$a. \text{ Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini mencerminkan efisiensi seluruh bagian yaitu produksi, personalia, pemasaran dan keuangan yang ada dalam perusahaan.

$$b. \text{ Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Penjualan}}$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan penjualan yang

dicapai perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi dalam menghasilkan laba.

$$c. \text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Gross Profit}}{\text{Sales}}$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor dengan penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi yang dicapai bagian produksi.

$$4. \text{Basic Earning Power} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Assets}}$$

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki perusahaan (Sudana, 2009).

$$5. \text{Cash Flow Return on Asset} = \frac{(\text{CF} + \text{Depreciation})}{\text{Total Assets}}$$

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Dengan laba operasi yang meningkat, maka akan meningkatkan kemampuan perusahaan menambah kapasitas operasi dan memperkuat daya tahan operasi perusahaan (Cornett et al., 2006).

Selain itu, dalam perusahaan perbankan juga memiliki rasio lain dalam mengukur kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan perbankan yang lain diantaranya sebagai berikut:

1. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2002) CAR adalah kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia, CAR (*capital adequacy ratio*) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank

lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.

Menurut Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Rasio CAR diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Total Capital Available}}{\text{Total Risk Weighted Assets}}$$

2. Biaya Operasi Pendapatan Operasi (BOPO)

Efisiensi operasional merupakan upaya untuk mengetahui apakah bank dalam operasionalnya dilakukan dengan benar, sesuai dengan tujuan pendirian dan para pemegang saham. Efisiensi berpengaruh terhadap kinerja bank karena dapat menunjukkan apakah bank tersebut dapat menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna.

Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya. Biaya operasional terdiri atas biaya bunga, biaya valuta asing lainnya, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, biaya penyusutan, dan biaya operasional lainnya. Pendapatan operasional terdiri atas semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima. Pendapatan operasional bank terdiri atas hasil bunga, provisi dan komisi, pendapatan valuta asing lainnya, dan pendapatan operasional lainnya. Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktifitas usahanya (Lukman Dendawijaya, 2009).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, formulasi rumus BOPO sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Total Operating Expenses}}{\text{Total Operating Income}}$$

3. *Non Performing Loan* (NPL)

Non Performing Loan didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya (Imam Gozali, 2009). NPL adalah rasio kredit bermasalah dengan total kredit. Hal ini dapat terjadi karena

bisnis utama perbankan adalah pemberian pinjaman yang berpotensi pada kegagalan nasabah dalam melakukan pengembalian. Bisa saja kegagalan pembayaran tersebut karena faktor eksternal yang tidak dapat direncanakan dan dikendalikan, namun tidak sedikit pula yang muncul akibat kesengajaan yang bersangkutan. Tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kepada bank menyebabkan bank menderita kerugian dengan tidak diterimanya penerimaan yang sebelumnya sudah diperkirakan.

Rumus perhitungan *Non Performing Loan* adalah:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total Non Performing Loan} \times 100}{\text{Total Loan}}$$

2.1.3 Corporate Governance

2.1.3.1 Pengertian *Corporate Governance*

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG, 2001)*, *good corporate governance* adalah struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ–organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan moral, etika, budaya, dan aturan yang berlaku.

Definisi *corporate governance* menurut Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan, dan nilai–nilai etika.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001)* pengertian *good corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal

lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Berdasarkan beberapa pengertian *Good Corporate Governance*, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ–organ perusahaan untuk mendorong kinerja perusahaan untuk semakin efisien dalam menghasilkan peningkatan nilai pemegang saham secara berkesinambungan dan dengan tetap memerhatikan kepentingan stakeholder lainnya.

2.1.3.2 Manfaat Corporate Governance

Manfaat penerapan *good corporate governance* bagi perusahaan menurut *Forum for Corporate Governance Indonesia* adalah sebagai berikut:

1. Meminimalkan *agency cost*

Pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman, selain itu dengan memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan akan menjadi lebih kompetitif.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Mekanisme *corporate governance* yang semakin baik akan mendorong investor untuk memutuskan membeli saham perusahaan tersebut.

4. Mengangkat citra perusahaan

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut di mata masyarakat dan khususnya para investor. Citra (*image*) suatu perusahaan kadangkala akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri.

2.1.3.3 Asas *Corporate Governance*

Komite Nasional Kebijakan *Governance* pada tahun 2006 telah mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Pedoman GCG merupakan panduan bagi perusahaan dalam membangun, melaksanakan, dan mengkomunikasikan praktik GCG kepada pemangku kepentingan. Dalam pedoman tersebut KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) memaparkan azas-azas GCG (KNKG, 2006) sebagai berikut:

1. *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan stakeholder lainnya.

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate governance*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesenjajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.3.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan saham manajerial dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer yang menanggung risiko apabila ada kerugian yang sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Dengan kepemilikan manajerial yang lebih besar akan menurunkan biaya keagenan. Hal ini dimulai dengan menggambarkan perusahaan yang dikelola oleh 100% pemiliknya sendiri, maka biaya keagenan bisa tidak ada. Kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki intensif untuk memonitor. Kepemilikan manajerial sebenarnya mempunyai dua peranan yang berbeda. Pertama, ia bertindak sebagai pemilik perusahaan, dan kedua ia bertindak sebagai manajer. Peranan seperti ini dapat mengganggu manajer ketika bekerja dan dapat menimbulkan keinginan untuk mempertahankan kedudukannya di perusahaan. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen. Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik (Jensen dan Meckling, 1967).

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajer atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham (Christiawan dan Tarigan, 2007). Sedangkan, menurut Henry, D (2006), kepemilikan manajerial yakni persentase dari total modal saham dalam perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan.

Berikut ini merupakan rumus untuk mengukur kepemilikan manajerial:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Saham yang dimiliki Manajer}}{\text{Total Saham Perusahaan}}$$

Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah presentase saham yang dimiliki manajer. Kepemilikan manajerial dipandang sebagai mekanisme kontrol yang tepat untuk mengurangi konflik keagenan yang menyebabkan *agency cost* yang tinggi. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan manajer dengan pemegang saham sehingga manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajer akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini karena manajer merupakan salah satu pemilik perusahaan dan bukan hanya sebagai pihak eksternal yang dipekerjakan untuk memenuhi kepentingan pemilik perusahaan. Manajer memegang peranan penting karena manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengambil keputusan (Sukirni, 2012).

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki oleh manajer yang dinyatakan dalam persentase sehingga manajer sekaligus sebagai pemegang saham.

2.1.3.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain, seperti oleh perusahaan asuransi, bank, dan perusahaan investasi. Kepemilikan institusional merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*, karena memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang

tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga akan mampu menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajemen serta meminimalisir tingkat penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen (Jensen dan Meckling, 1976).

Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah saham yang dimiliki institusi dari total saham yang beredar. Adanya kepemilikan institusional dapat memantau secara profesional perkembangan investasinya sehingga tingkat pengendalian terhadap manajemen sangat tinggi sehingga dapat menekan potensi kecurangan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegah terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faisal, 2005).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang kuat dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan (Tarjo, 2008). Sedangkan, menurut Henry, D (2006), kepemilikan institusional yakni persentase dari total modal saham dalam perusahaan yang dimiliki oleh pemilik institusional.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiunan atau perusahaan lain yang diukur dengan presentase yang dihitung pada akhir tahun.

Berikut ini merupakan rumus untuk mengukur kepemilikan institusional:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$$

Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen *monitoring* ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran bagi pemegang saham. Dalam hubungannya dengan

fungsi monitor, investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual (Perdana dan Raharja, 2014).

Semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh lembaga (institusi), maka mekanisme kontrol manajemen kinerja akan lebih efektif. Dengan demikian, semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Selain itu, keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajemen sehingga dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Mukhtaruddin et al., 2014).

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Kepemilikan institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi dan memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan (Wiranata dan Nugrahanti, 2013).

2.1.3.6 Komite Audit

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia mendefinisikan komite audit (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006) sebagai berikut sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

Komite audit memiliki tugas yang berhubungan dengan kualitas pelaporan keuangan. Keberadaan komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris melakukan tugasnya dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Selain itu, peran komite audit juga sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas penyampaian kinerja perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan, karena

informasi tersebut merupakan informasi penting bagi *stakeholders*, khususnya bagi investor dan kreditor dalam menilai perusahaan. Komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisasi. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme *corporate governance* mampu mengurangi adanya praktik manipulasi terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006).

Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen yang mana harus berasal dari pihak eksternal perusahaan yang independen.

Menurut Kep-29/PM/2004 tugas komite audit antara lain:

- a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya,
- b) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,
- c) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,
- d) Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,
- e) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten,

f) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Berikut ini merupakan cara pengukuran komite audit:

$$\text{Kinerja Komite Audit} = \frac{\text{Rata-rata Skor Komite Audit}}{\text{Rata-rata Skor Komite Audit}} = \frac{\text{Rata-rata Skor Komite Audit}}{\text{Rata-rata Skor Komite Audit}}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *good corporate governance* dan kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

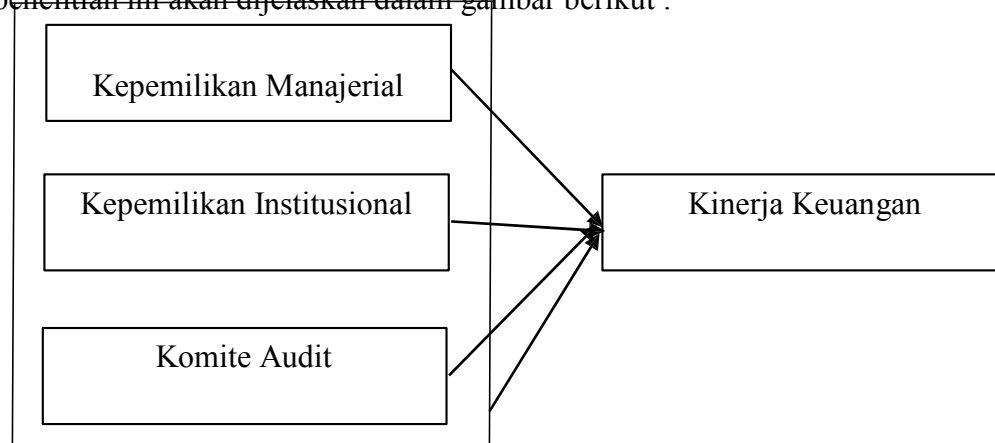
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Laksana (2015)	<i>Corporate Governance</i> dan kinerja keuangan (studi kasus pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2008-2012)	Penelitian menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dan dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
2	Hartono dan Nugrahanti (2014)	Pengaruh mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan	Penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	Nur'ainy, et. Al (2013)	<i>Implementation of Good Corporate Governance and Its Impact on Corporate Performance : The Mediation Role of Firm Size (Empirical study from Indonesia)</i>	Penelitian menunjukkan bahwa implementasi <i>good corporate governance</i> memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan dan juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kinerja perusahaan melalui ukuran perusahaan.
4	Az'ari, dkk (2019)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI	Hasil penelitian ini menunjukkan dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan, dewan komisarin independen, komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

2.3 Kerangka Berpikir

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji hubungan antara mekanisme *corporate governance* dan kinerja keuangan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam gambar berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Kepemilikan institusional yang tinggi akan memungkinkan untuk pengendalian yang lebih ketat terhadap perilaku manajer agar tidak berusaha

memaksimalkan kemakmuran dirinya sendiri. Dengan pengalaman yang dimiliki investor institusional yang lebih dibandingkan dengan investor lainnya, maka akan dapat menjadi alat monitoring yang efektif terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Sehingga manajemen perusahaan akan lebih terkontrol dengan baik dan akan membuat manajemen perusahaan untuk lebih fokus menaikkan kinerja perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan jika biaya keagenan akan semakin rendah apabila kepemilikan manajerial akan semakin tinggi. Hal ini terjadi karena kepemilikan saham manajerial akan memungkinkan adanya penyatuan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham yang membuat setiap peningkatan proporsi kepemilikan saham manajerial akan mendorong kerja keras dari manajer untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Jadi, peningkatan proporsi kepemilikan saham manajerial akan memotivasi manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam (SE-07/PM/2004) diwajibkan agar semua emiten atau perusahaan publik untuk memiliki komite audit. Komite audit diharapkan dapat membantu komisaris dan bertindak secara independen dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta meningkatkan efektifitas audit dan eksternal audit. Apabila komite audit menjalankan fungsinya dengan baik maka tindakan manajemen akan dapat dimonitor agar tetap berfokus pada peningkatan kinerja untuk kemakmuran pemegang saham. Dengan kata lain, komite audit yang efektif akan mendorong manajemen perusahaan untuk bekerja guna peningkatan kinerja perusahaan.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis hasil penelitian terdahulu dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- 1 Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.
- 2 Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
- 3 Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.
- 4 Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja keuangan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020 dengan mengakses situs www.idx.co.id. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2022 sampai dengan selesai.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2016). Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020. Alasan peneliti memilih perusahaan perbankan dalam penelitian ini dikarenakan sektor ini merupakan sektor yang memiliki kontribusi relatif besar terhadap perekonomian rakyat dan sumber pemasukan yang cukup besar bagi negara. Adapun jumlah populasi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020 ada sebanyak 42 perusahaan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *Purposive sampling* adalah cara pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dilakukan peneliti dalam pemilihan sampel pada penelitian ini adalah:

1. Menerbitkan Laporan Keuangan untuk periode 2018-2020.
2. Laporan keuangan perusahaan perbankan disajikan dalam mata uang Rupiah.
3. Data yang dibutuhkan terkait dengan variabel penelitian disajikan dengan lengkap selama periode 2018-2020.

Setelah dilakukan pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria di atas, maka dapat diambil jumlah sampel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengambilan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
Jumlah Populasi	42
Kriteria 1:	
Perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangan 2018-2020	3
Kriteria 2:	
Laporan keuangan tidak menggunakan mata uang Rupiah	4
Kriteria 3:	
Perusahaan tidak memiliki data lengkap	15
Jumlah Sampel	20

Sumber: Hasil olah data yang diunduh dari www.idx.co.id, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terpilih 20 perusahaan yang menjadi sampel penelitian, dan berikut ini adalah daftar perusahaan tersebut:

Tabel 3.2
Daftar Sampel Perusahaan

No	Kode Emiten	Nama Bank
1	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.
2	BACA	Bank Capital Indonesia Tbk.
3	BBCA	Bank Central Asia Tbk.
4	BBMD	Bank Mestika Dharma Tbk.
5	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
6	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
7	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
8	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk.
9	BINA	Bank Ina Perdana Tbk.
10	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
11	BMAS	Bank Maspion Indonesia Tbk.
12	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.
13	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk.
14	BSIM	Bank Sinarmas Tbk.
15	BTPN	Bank BTPN Tbk.
16	MAYA	Bank Mayapada Internasional Tbk.
17	MCOR	Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
18	NISP	Bank OCBC NISP Tbk.
19	NOBU	Bank Nationalnobu Tbk.
20	SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

Sumber: Hasil olah data yang diunduh dari www.idx.co.id, 2022

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.3.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat/nilai dari orang objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2008). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan institusional (X_1), variabel kepemilikan manajerial (X_2) dan variabel Komite Audit (X_3). Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja keuangan (Y).

3.3.2 Definisi Operasional

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional menggunakan definisi Henry, D (2006) yakni persentase dari total modal saham dalam perusahaan yang dimiliki oleh pemilik institusional.

$$\text{KI} = \frac{\text{Modal Saham Institusional}}{\text{Total Modal Saham}}$$

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial menggunakan definisi Henry, D (2006) yakni persentase dari total modal saham dalam perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan.

$$\text{KM} = \frac{\text{Modal Saham Manajerial}}{\text{Total Modal Saham}}$$

3. Komite Audit

Komite audit menggunakan definisi yang sesuai dengan definisi Bapepam-LK (Kep. Ketua Bapepam-LK No. Kep-134/BL/2006) dan Pedoman *Good Corporate Governance* Tahun 2006 yakni sekelompok orang yang dipilih Dewan Komisaris yang bertanggung jawab

membantu auditor dalam mempertahankan independensi dari manajemen.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Total Modal Saham}}{\text{Total Aset}}$$

4. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan pencapaian kinerja keuangan selama 1 tahun yang direpresentasikan dalam laporan keuangan. Guna mengukur kinerja keuangan perusahaan, peneliti menggunakan ROA. ROA merupakan rasio yang mengukur laba bersih setelah pajak dengan total aset (Sudana, 2009).

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Tabel 3.3
Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Kepemilikan Institusional	Persentase dari total modal saham dalam perusahaan yang dimiliki oleh pemilik institusional	$\frac{\text{Total Modal Saham}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
2	Kepemilikan Manajerial	Persentase dari total modal saham dalam perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan.	$\frac{\text{Total Modal Saham}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
3	Komite Audit	Sekelompok orang yang dipilih Dewan Komisaris yang bertanggung jawab membantu auditor dalam mempertahankan independensi dari manajemen.	$\frac{\text{Total Modal Saham}}{\text{Total Aset}}$	Rasio

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
4	Kinerja Keuangan	Pencapaian kinerja keuangan selama 1 tahun yang direpresentasikan dalam laporan keuangan	$\frac{\text{Rasio}}{\text{Rasio}}$	Rasio

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mengambil data penelitian berbentuk data sekunder. Dalam pengumpulan data penelitian akan membutuhkan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengambil data-data yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia melalui situs www.idx.co.id.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya (Sanusi, 2016). Data yang telah dikumpulkan merupakan data panel yang kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan analisis statistik yang menggunakan *Software Eviews*.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum (Ghozali, 2013). Analisis deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi data dari variabel-variabel yang diteliti

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013:160). Pengujian Normalitas dilakukan dengan melihat nilai 2-

tailed significant. Jika data memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% sehingga data dikatakan berdistribusi normal. Dalam penelitian ini untuk melihat normalitas data menggunakan uji *Kolmogorof-Smirnof*.

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2013). Jika terjadi korelasi, maka terjadi masalah multikolinieritas. Multikolinieritas dapat dilihat dengan menggunakan dua cara yaitu menghitung *variance inflation factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *tolerance* mengukur variabel bebas terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. *Variance inflation factor* (VIF) dihitung dengan rumus $VIF = 1/Tolerance$. Nilai *cutoff* yang digunakan pada penelitian ini untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2013).

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi linier. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2013). Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Run Test*, dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai probabilitasnya dibandingkan dengan nilai α .

3.5.2.4 Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni melihat grafik *plot*, uji *park*, uji *glejser*, dan uji *white* (Ghozali, 2013). Pada penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah menggunakan uji statistik yaitu uji *park*. Jika variabel independen signifikansi secara statistik mempengaruhi variabel independen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas (Ghozali, 2013).

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Data panel adalah data yang dikumpulkan secara cross section dan diikuti pada periode waktu tertentu. Data panel merupakan gabungan dari data cross section dan time series. Oleh karena itu diperlukan teknik tersendiri untuk mengatasi model yang menggunakan data panel. Teknik yang digunakan yaitu:

- 1 *Common Effect Model* atau *Pooled Least Square*, Teknik ini hampir mirip dengan membuat regresi dengan *cross section* atau *time series*. Tetapi, untuk data panel, sebelum membuat regresi atau *cross section* dan data *time series* harus digabungkan terlebih dahulu.
- 2 Model Efek Tetap (*Fixed Effect*) Pendekatan *fixed effect* memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi *omitted-variables*, yang mungkin membawa perubahan pada *intercept time series* atau *cross section*.
- 3 Model Efek Random (*Random Effect*)

Pendekatan random effect memperbaiki efisiensi proses least square dengan memperhitungkan error dari cross section dan time series. Model random effect adalah variasi dari estimasi generalized least square (GLS). Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksi melalui variabel secara individual.

Adapun persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b1 KI + b2 KM + b3 KA + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan

a	= Konstanta
b1, b2, b3	= Koefisien Regresi
KI	= Kepemilikan Institusional
KM	= Kepemilikan Manajerial
KA	= Komite Audit
ε	= Error

3.5.4 Pemilihan Model Regresi Linier Berganda

3.5.4.1 Uji Chow

Dalam menentukan apakah model estimasi CEM atau FEM dalam membentuk model regresi, maka dapat digunakan uji Chow. Uji Chow merupakan model pengujian statistik yang dilakukan untuk memilih apakah lebih baik menggunakan model efek biasa atau model efek tetap. Hipotesis yang diuji sebagai berikut:

- a. $H_0 = \text{Common Effect Model (CEM)}$
- b. $H_a = \text{Fixed Effect Model (FEM)}$

Dengan kriteria:

- 1) Jika nilai probabilitas *chi-square* $\geq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- 2) Jika nilai probabilitas *chi-square* $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

3.5.4.2 Uji Hausman

Untuk mengetahui apakah model antara *fixed effect model* dengan *random effect model* untuk membentuk model regresi dapat digunakan uji Hausman. Uji Hausman merupakan model pengujian statistik yang dilakukan untuk memilih apakah lebih baik menggunakan model efek tetap atau model acak. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. $H_0 : \text{Random Effect Model (REM)}$
- b. $H_a : \text{Fixed Effect Model (FEM)}$

Dengan kriteria:

- 1) Jika nilai probabilitas $\geq 0,05$, maka H_0 tidak ditolak.

- 2) Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak.

3.5.4.3 Uji Lagrange Multiplier

Untuk mengetahui apakah model antara *common effect model* dengan *random effect model* untuk membentuk model regresi dapat digunakan uji Lagrange Multiplier. Uji Lagrange Multiplier merupakan model pengujian statistik yang dilakukan untuk memilih apakah lebih baik menggunakan model biasa atau model acak. Hipotesisi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. H_0 : *Common Effect Model* (CEM)
- b. H_a : *Random Effect Model* (REM)

Dengan kriteria:

- 1) Jika nilai probabilitas $\geq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- 2) Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

3.5.5 Uji Hipotesis

3.5.5.1 Uji Parsial

Uji t ini dilakukan untuk menguji apakah setiap variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, disebut juga uji secara individual. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan nilai signifikansinya.

Bentuk pengujiannya adalah:

1. Kepemilikan Manajerial

H_0 : $\beta_1 > 0,05$ artinya kepemilikan manajerial secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di BEI.

H_a : $\beta_1 < 0,05$, artinya kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di BEI.

2. Kepemilikan Institusional

H_0 : $\beta_2 > 0,05$ artinya kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di BEI.

$H_a : \beta_2 < 0,05$, artinya kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di BEI.

3. Komite Audit

$H_0 : \beta_3 > 0,05$ artinya komite audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di BEI.

$H_a : \beta_3 < 0,05$, artinya komite audit secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di BEI.

3.5.5.2 Uji Simultan

Uji F digunakan untuk menguji tingkat pengaruh variabel independen secara menyeluruh atau simultan terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada tingkat signifikan (α) = 5%, dengan ketentuan sebagai berikut:

$H_0 : \beta_4 > 0,05$ artinya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di BEI.

$H_a : \beta_4 < 0,05$, artinya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di BEI.

3.5.5.3 Uji Koefisien Determinasi

Uji yang digunakan peneliti untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen adalah uji determinasi (Ghozali, 2013). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada nilai *adjusted R Square*. Nilai *adjusted R Square* dikatakan baik jika diatas 0,5 karena nilai *R Square* berkisar antara nol dan satu.